

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

Oleh:

Mirza Rashid¹

Lynn Audrey²

Dea Christine Rengkung³

Dany Riski Musyary⁴

Rifki Akmal Nasution⁵

Ariel Dwi Rendrahadi⁶

Universitas Gadjah Mada

Alamat: Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta (55281).

*Korespondensi Penulis: mirzarashid@mail.ugm.ac.id, lynnaudrey@mail.ugm.ac.id,
deachristinerengkung512050@mail.ugm.ac.id, danyrizkimusyary@mail.ugm.ac.id,
rifkiakmalnasution@mail.ugm.ac.id, arieldwirendrahadi@mail.ugm.ac.id.*

Abstract. *The rapid development of digital technology has significantly influenced the way society interacts and obtains information. Behind its advantages, misleading information or hoaxes have also spread, becoming increasingly difficult to control and, without being realized, potentially threatening the spirit of national defense. Various digital literacy programs initiated by the government have indeed been implemented through formal mechanisms; however, in practice, they have not been truly effective in reducing the spread of hoaxes. This study aims to critically examine the gap between the structurally implemented digital literacy approach to national defense and the phenomenon of hoaxes, which rapidly evolve, are emotionally driven, and directly target the public. This research employs a literature study method by collecting information from secondary sources including scientific journals, policy reports, and other credible*

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

publications. The analysis reveals a condition referred to as pseudo-effectiveness, namely when digital literacy programs are considered successful based on administrative parameters but do not generate a real impact on public behavior in filtering information. The fundamental gap arises due to the incompatibility between the rigid nature of formal programs and the reality of hoax dissemination, which tends to be adaptive and often exploits emotional reactions. Based on these findings, it can be concluded that the current digital literacy approach to national defense requires restructuring with strategies that are more responsive and grounded in an understanding of digital behavior within society.

Keywords: *Digital Literacy, Hoax, National Defense, Pseudo-Effectiveness, Policy Approach.*

Abstrak. Kemajuan teknologi digital membawa dampak besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dan memperoleh informasi. Di balik manfaat tersebut, tersebar pula informasi keliru atau hoaks yang semakin sulit dikendalikan dan, tanpa disadari, dapat mengancam sikap bela negara. Berbagai program literasi digital yang digagas pemerintah sejauh ini memang sudah dijalankan melalui mekanisme formal, namun dalam praktiknya belum benar-benar mampu meredam penyebaran hoaks. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelaah secara kritis kesenjangan antara pendekatan literasi digital bela negara yang dilaksanakan secara struktural dengan fenomena hoaks yang berkembang cepat, berorientasi pada emosi, dan menyasar publik secara langsung. Penelitian memakai metode studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi terpercaya lainnya. Hasil analisis menunjukkan adanya kondisi yang dapat disebut sebagai efektivitas semu, yaitu situasi ketika program literasi digital dianggap berhasil berdasarkan parameter administrasi, tetapi tidak berdampak nyata terhadap perilaku masyarakat dalam menyaring informasi. Kesenjangan fundamental muncul akibat ketidakcocokan karakter program yang cenderung kaku dengan realitas penyebaran hoaks yang adaptif dan sering kali memanfaatkan reaksi emosional. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan literasi digital bela negara memerlukan transformasi dari yang bersifat

administratif-formal menuju pendekatan adaptif yang menyentuh dimensi psikologis dan emosional masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Digital, Hoaks, Bela Negara, Efektivitas Semu, Pendekatan Kebijakan.

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, istilah literasi digital kerap disinggung sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki para pengguna media digital, terutama internet. Pada dasarnya, literasi digital merupakan penggabungan antara keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran sosial di ruang maya (Harjono, 2018). Penerapan literasi digital yang baik menjadi pokok utama yang harus selalu ada ketika berselancar di dunia digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa Interaksi sosial yang terjadi di dalamnya tersebar secara meluas, membuat tingkat kognitif, etika, dan tata krama dari para pelaku digital menjadi cerminan tingkat literasi digital. Dengan literasi digital yang mumpuni, informasi yang diterima dapat diproses dengan bijak untuk membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan (Nurhaipah dan Ramallah, 2024).

Urgensi literasi digital ini memiliki relevansi dalam konteks bela negara di era modern. Saat ini, bela negara tidak hanya bersifat militeristik, tetapi lebih luas cakupannya dalam aspek kehidupan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Rahayu dkk., 2023). Kebiasaan sehari-hari yang terhubung dengan teknologi membuat proses bela negara di masyarakat mulai berubah dengan mengarah pada segala tindak-tanduk dan perilakunya di dunia digital. Para pelaku digital dapat menerapkan prinsip bela negara pada dunia digital dengan menunjukkan budaya yang positif, mematuhi tata perilaku hukum siber, dan memahami dampak perilaku daring terhadap stabilitas nasional. Sayangnya, prinsip bela negara ini masih belum diwujudkan dengan baik yang terlihat pada tersebarnya informasi-informasi tanpa kejelasan fakta. Penyebaran jenis informasi tersebut dapat menyebabkan perpecahan antarkelompok publik (Nurhaipah dan Ramallah, 2024).

Hoaks merupakan informasi yang dibuat dalam bentuk yang palsu atau rekayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya atau dapat dikatakan dengan tindakan memutarbalikan fakta yang tersaji (Nurgiansah dalam Sulistyono & Najicha, 2022). Di era

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

digital ini, dengan informasi yang mudah menyebar ke seluruh penjuru wilayah, hoaks menjadi lebih tidak terkendali penyebarannya. Hal ini didukung oleh masyarakat yang sering kali langsung percaya terhadap informasi yang didapatkan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu (Nurhaipah dan Ramallah, 2024). Dalam tingkat nasional, hoaks dapat menjadi ancaman yang cukup serius. Informasi yang disebar tanpa fakta yang tepat, berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan, baik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun perihal strategis.

Urgensi dalam menangani hoaks yang tersebar menjadi hal pokok untuk dilakukan pemerintah. Menurut Komdigi, sepanjang tahun 2024, telah ditemukan sebanyak 1.923 konten yang mengandung informasi palsu dengan frekuensi tertingginya berada pada kategori penipuan dengan temuan sebanyak 890 konten. Selain itu, masalah politik, pemerintahan, dan kesehatan menjadi topik yang digemari informasi palsu setelah kategori penipuan. Tidak dipungkiri, meskipun penemuan Komdigi menunjukkan angka yang fantastis, masih terdapat potensi yang sangat tinggi bahwa konten-konten yang mengandung informasi palsu ini berkali-kali lipat dari yang telah teridentifikasi. Hal ini tidak hanya berisiko pada pengaruh persepsi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kerugian secara materil. Tanpa adanya penanganan yang efektif, hoaks akan semakin merajalela dan masyarakat luas menjadi terkena efek negatifnya.

Namun demikian, penanggulangan hoaks menjadi tantangan yang sangat berat. Hoaks selalu memiliki sifat dalam memainkan emosi dan mengajak pembacanya untuk ikut menyebarkan informasi tersebut. Selain itu, sering kali dicantumkan sumber yang tidak jelas hanya untuk sekedar meningkatkan kredibilitas secara sekilas, tetapi sebenarnya tidak memiliki validitas yang cukup (Kusumastuty, n.d.). Hal tersebut membuat berita hoaks semakin rumit untuk diatasi. Di sisi lain, program pemerintah dalam menangani hoaks masih perlu laporan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai hoaks tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya harus melanjutkan pemberantasan pada hoaks, tetapi juga menilai efektivitasnya dalam mengurangi jumlah yang muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap efektivitas metode pemberantasan hoaks oleh pemerintah dengan tingkat penyebaran dan sifat-sifat hoaks yang menyebar di masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Konsep bela negara diartikan sebagai sikap, tekad, dan tindakan warga negara dalam menjaga keberlanjutan bangsa dari berbagai ancaman. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa bela negara adalah bentuk kecintaan warga terhadap NKRI yang didasari Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan ini diperluas oleh Yunita dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa kewajiban membela negara tidak hanya ada di institusi pertahanan, seperti TNI dan Polri, tetapi juga menjadi tugas seluruh warga negara. Dengan demikian, bela negara tidak hanya berkaitan dengan konteks militer, tetapi juga menjadi kewajiban sipil yang melibatkan berbagai sektor kehidupan. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi, makna bela negara kini juga termasuk upaya melindungi negara dari ancaman yang tidak fisik, seperti yang dijelaskan oleh Akbar dkk. (2024) bahwa bela negara kini juga menghadapi ancaman digital seperti serangan siber dan penyebaran informasi palsu.

Era digital merujuk pada masa ketika aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, internet, serta sistem komunikasi yang terhubung secara global. Akbar dkk. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat ancaman tidak hanya berasal dari aspek fisik, tetapi juga dari lingkungan digital. Mereka juga memperkenalkan era digital sebagai masa yang ditandai oleh kemunculan teknologi canggih, seperti *big data*, *artificial intelligence*, dan *internet of things (IOT)*, yang telah mengubah cara berinteraksi dan berperilaku masyarakat. Dalam konteks bela negara, transformasi digital ini membawa ancaman baru, seperti manipulasi informasi, propaganda, hingga serangan siber yang bisa memengaruhi stabilitas negara. Untuk itu, kewaspadaan terhadap informasi digital menjadi bagian penting dari strategi bela negara saat ini.

Karakteristik program formal dalam kebijakan publik merujuk pada program yang dirancang dan dikerjakan secara terstruktur, bersifat *top-down*, serta mengikuti mekanisme birokratis. Akbar dkk. (2024) memberikan contoh bahwa pemerintah menyusun program literasi digital melalui kurikulum, pelatihan, serta regulasi khusus sebagai langkah formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Namun, pelaksanaan program formal tidak selalu berjalan baik. Yunita dkk. (2023) menemukan bahwa program bela negara sering kali menghadapi kendala koordinasi antarlembaga karena instansi pemerintah kerap bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang kuat.

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

Contohnya terlihat dalam penanganan hoaks oleh Kominfo ketika pemerintah menggunakan mekanisme resmi, seperti pemantauan, verifikasi, dan publikasi penjelasan, sebagai bagian dari pendekatan birokratis. Model ini menunjukkan bahwa program formal biasanya bergantung pada instruksi dari atasan atau pusat, prosedur administratif, dan kerangka regulasi yang ketat.

Hoaks bisa diartikan sebagai penyebaran informasi palsu yang direayasa secara sengaja, dengan tujuan memengaruhi atau menyesatkan opini masyarakat. Menurut Akbar dkk. (2024), literasi digital menjadi penting agar masyarakat bisa memilah dan memverifikasi informasi dengan bijak, terutama untuk menghadapi berita palsu dan propaganda. Yunita dkk. (2023) juga menekankan bahwa penyebaran hoaks bisa memicu perpecahan sosial dan mengganggu stabilitas negara, terlebih karena informasi bisa menyebar cepat melalui media digital. Akbar dkk. (2024) juga menambahkan bahwa hoaks bisa mengancam persatuan bangsa jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Secara teoretis, hoaks menyebar cepat karena memanfaatkan kecenderungan masyarakat untuk percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka dan merespons emosi yang diatur oleh narasi yang provokatif.

Konsep efektivitas semu merujuk pada situasi ketika program tampak berhasil dalam hal pelaksanaan teknis atau administratif, tetapi tidak benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Akbar dkk. (2024) mengungkapkan bahwa banyak program literasi digital yang berjalan rutin, tetapi belum tentu meningkatkan kesadaran atau keterampilan masyarakat secara nyata. Yunita dkk. (2023) juga menemukan bahwa beberapa program bela negara belum berdampak signifikan bagi generasi muda, meskipun sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan formal. Efektivitas semu terjadi ketika keberhasilan sebuah program dinilai hanya dari jumlah kegiatan, materi pelatihan, atau laporan administratif, tanpa memastikan adanya perubahan perilaku masyarakat, seperti tidak menurunnya angka penyebaran hoaks atau rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa bela negara di era digital memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengandalkan struktur birokrasi atau program formal, tetapi juga pada peningkatan literasi digital masyarakat.

Keberhasilan bela negara bergantung pada mampu menciptakan masyarakat yang bisa menyaring informasi, memahami risiko di dunia digital, serta berkontribusi pada stabilitas nasional melalui penggunaan media yang bijak. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara kebijakan formal, partisipasi masyarakat, dan strategi penguatan literasi informasi dalam menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan desain studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis beragam temuan terdahulu secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung. Literatur diperoleh dari sumber sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah yang terbuka secara publik, dokumen kebijakan pemerintah, berita digital yang kredibel, dan publikasi akademik lain yang masih relevan, khususnya dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Proses analisis data dilakukan secara tematik. Informasi yang terkumpul dipetakan ke dalam dua arah utama, pertama adalah aspek program literasi digital formal yang dirancang melalui kebijakan dan mekanisme birokrasi dan kedua adalah kondisi penyebaran hoaks di masyarakat yang berkembang secara cepat dan sangat dipengaruhi oleh faktor emosional publik. Kedua tema tersebut kemudian diperbandingkan untuk menilai arah ketidaksesuaian dan mengidentifikasi penyebab munculnya efektivitas semu dalam pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Digital dalam Bela Negara

Literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memahami, menilai, dan mengolah informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Dalam konteks bela negara, literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan media digital, melainkan juga kesadaran warga negara dalam menyaring informasi, mengenali disinformasi, dan berpartisipasi secara positif di ruang siber. Penelitian oleh Akbar dkk. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa lewat informasi yang sehat dan kritis.

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam stabilitas dan integritas nasional, terutama melalui penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa tingkat literasi informasi yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kemampuan mengenali hoaks serta menurunkan kecenderungan untuk membagikan informasi palsu (Kurniasih, 2024). Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai alat preventif, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara kolektif dalam menjaga ruang digital dari disinformasi yang berpotensi memecah belah dan melemahkan persatuan nasional.

Meskipun secara konseptual peran literasi digital sangat penting, implementasi program di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Program-program yang didukung pemerintah dan lembaga terkait, misalnya Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi) yang mengedepankan kampanye berpikir kritis melalui kanal-kanal, seperti YouTube. Namun, pada penerapannya seringkali menunjukkan kecenderungan administratif dan seremonial dengan hanya berfokus pada kegiatan seminar, pelatihan singkat, dan pelaporan kegiatan daripada perubahan perilaku jangka panjang yang terukur (Hakim, 2024). Evaluasi pada tingkat lokal memperlihatkan bahwa implementasi program literasi digital pun belum mampu menjangkau dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, seperti studi pada implementasi *Society 5.0* dan literasi digital di Jakarta yang menemukan bahwa banyak warga belum menguasai aplikasi layanan publik dan masih lemah dalam keterampilan digital dasar, yang menandakan jurang antara program formal dengan realitas kapasitas pengguna (Evita, 2022). Faktor lain yang memperlemah efektivitas program adalah kurangnya sinergi lintas lembaga, seperti inisiatif dari Kominfo, Kemendikbud, BNPT, dan kementerian/lembaga lainnya sering berjalan paralel tanpa peta jalan nasional yang terpadu sehingga upaya literasi menjadi *fragmented*, duplikatif, atau tidak berkelanjutan. Kondisi ini menghasilkan situasi yang disebut efektivitas semu, yaitu kondisi ketika terdapat statistik kegiatan dan laporan keberhasilan administratif, tetapi perubahan kapabilitas kritis masyarakat terhadap hoaks dan kontribusi nyata terhadap bela negara digital masih rendah (Hakim, 2024).

Realita Gempuran Hoaks

Hoaks hadir sebagai informasi yang direkayasa secara sengaja, menggunakan bahasa yang tampak meyakinkan, namun tidak berbasis fakta dan sulit diverifikasi. Ia beroperasi bukan hanya untuk menyesatkan, tetapi untuk membentuk persepsi, memanipulasi emosi, dan mengarahkan opini publik pada kepentingan tertentu, baik politik, sosial, maupun ideologis (Listuti, 2023). Penyebaran hoaks semakin masif seiring meningkatnya penggunaan media sosial yang membuka ruang bagi akun anonim untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi tanpa mekanisme penyaringan yang jelas. Lingkungan ini menciptakan kondisi dengan setiap orang atau kelompok dapat menjadi produsen informasi, tanpa mempertanggungjawabkan validitasnya. Fenomena ini menjadikan hoaks tampak sebagai bagian normal dari arus komunikasi digital, bukan sebagai anomali yang mudah dikenali (Listuti, 2023).

Salah satu karakter utama hoaks yang paling mencolok adalah kecepatannya dalam menyebar. Penyebaran informasi palsu berlangsung dengan pola viral yang sangat cepat karena pengguna media sosial cenderung memberikan informasi hanya berdasarkan kesan awal, tanpa verifikasi lanjutan. Kondisi ini diperkuat oleh minimnya budaya literasi kritis sehingga satu informasi yang belum terkonfirmasi dapat menjangkau ribuan orang hanya dalam waktu singkat (Rahmadhany dkk., 2021). Kecepatan ini juga diperparah oleh absennya filter yang efektif dari platform digital. Media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp memberikan fasilitas distribusi pesan melalui skema yang mendorong kecepatan dan kuantitas, bukan validitas. Akibatnya, informasi simpang siur dengan mudah mengalir dan membentuk konstruksi realitas sosial yang bias serta rapuh secara epistemik (Situngkir, 2017 dalam Rahmadhany dkk., 2021).

Dimensi berikutnya adalah emosionalitas hoaks. Penelitian menunjukkan bahwa hoaks dirancang untuk menyasar kemarahan, ketakutan, dan kepanikan massa. Konten yang memuat unsur sosial-politik dan SARA terbukti lebih cepat menarik perhatian dan memicu reaksi impulsif audiens. Hal ini menjadikan hoaks tidak hanya sebagai pesan informatif, tetapi sebagai stimulus emosional yang memicu respons afektif dan reaktif (Listuti, 2023).

Dimensi psikologis juga menjadi kunci efektivitas hoaks. Penerima informasi cenderung mempercayai pesan yang selaras dengan keyakinan, ideologi, atau posisi sosialnya. Situasi ini membuat bias konfirmasi bekerja secara dominan dalam proses

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

penerimaan informasi. Individu tidak hanya menerima hoaks, tetapi juga memperkuatnya karena dianggap relevan dengan identitas kelompoknya (George dkk., 2021). Bias ini membentuk lingkungan *echo chamber* dengan informasi yang berulang dalam jejaring homogen menciptakan validasi semu dan memperkuat keyakinan kolektif meskipun tidak berbasis fakta. Dalam kondisi ini, klarifikasi sering ditolak karena dianggap bertentangan dengan narasi yang telah mapan secara emosional (George dkk., 2021).

Algoritma media sosial juga berperan signifikan dalam memperkuat penyebaran hoaks karena dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik perhatian pengguna tanpa mempertimbangkan validitas informasi yang disebarkan. Sarjito (2021) menjelaskan bahwa platform, seperti Facebook dan Twitter secara sistematis mempromosikan konten yang menghasilkan interaksi tinggi sehingga berita palsu yang sensasional lebih mudah memperoleh visibilitas dibandingkan informasi yang bersifat faktual. Hal ini menjadikan hoaks lebih sering muncul dalam linimasa pengguna dan mempercepat proses normalisasi informasi menyesatkan di ruang digital.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hoaks bekerja melalui kombinasi struktur teknologi, manipulasi emosional, adaptasi naratif, dan eksploitasi psikologis audiens. Di sisi lain, respon negara melalui program bela negara dan literasi digital kerap masih bersifat normatif. Penekanan diberikan pada kewajiban moral untuk tidak menyebarkan hoaks, tanpa menyentuh akar struktural berupa desain platform, mekanisme emosi, dan bias kognitif yang menjadi mesin utama penyebaran disinformasi (Listuti, 2023).

Kesenjangan Literasi Digital Terhadap Hoaks

Kesenjangan yang memperkuat munculnya efektivitas semu dalam program literasi digital sebenarnya lahir dari jarak antara cara kerja program dan cara kerja hoaks itu sendiri. Selama ini, banyak intervensi literasi masih berangkat dari asumsi lama bahwa masalah utama terletak pada kurangnya pengetahuan publik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hoaks bergerak di wilayah yang jauh lebih emosional dan psikologis dibandingkan sekadar persoalan tahu atau tidak tahu. Temuan Vosoughi dkk. (2018) menyatakan bahwa hoaks menyebar 70% lebih cepat karena unsur kejutan dan kemarahan

memperlihatkan satu hal yang sering diabaikan, pada situasi saat orang tidak berurusan dengan informasi sebagai teks semata, melainkan sebagai pemantik emosi. Di titik ini, literasi digital berbasis ceramah atau modul menjadi tidak sebanding dengan dinamika dunia nyata.

Pennycook & Rand (2019) bahkan menunjukkan bahwa kegagalan memverifikasi informasi lebih sering dipicu oleh dorongan impulsif atau rasa yang mendorong seseorang untuk membagikan sesuatu yang terasa penting, bukan ketidakmampuan intelektual. Ini masuk akal jika kita melihat bagaimana orang berinteraksi di media sosial yang memperlihatkan bahwa semua prosesnya serba cepat, serba instan, dan sering kali serba emosional. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dalam pelatihan formal tidak otomatis muncul ketika seseorang sedang terpancing marah atau takut. Banyak program literasi digital seolah lupa bahwa manusia bukan mesin logika melainkan terdapat bias, yaitu identitas kelompok dengan memunculkan perasaan ingin menjadi bagian dari suatu perkumpulan, yang turut mendorong orang memberikan informasi tanpa sempat berpikir panjang.

Di sisi lain, pendekatan pemerintah masih bersifat skolastik yang dipenuhi definisi, konsep, dan langkah-langkah teknis yang rapi, tetapi kurang menyentuh realitas psikologi pengguna. Bahkan, Tandoc dkk. (2021) menegaskan bahwa program semacam ini cenderung tidak efektif ketika tidak dibarengi intervensi yang mengarah pada literasi emosional dan kesadaran atas bias pribadi. Dengan kata lain, pemerintah mengajarkan masyarakat cara mengecek fakta, tetapi tidak mengajarkan metode mengelola emosi yang muncul sebelum jari mereka membagikan suatu informasi.

Kekosongan edukasi pada sisi emosional masyarakat inilah yang menjadi celah bagi upaya penanganan hoaks. Materi literasi yang hanya berfokus pada definisi dan aspek legalitas terbukti tidak mampu menjadi perlindungan yang efektif dalam menghadapi narasi hoaks yang dirancang khusus untuk menyerang emosi penerimanya. Akibatnya, hoaks tetap leluasa memanipulasi opini publik karena kesadaran masyarakat terhadap serangan psikologis belum terbangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa gempuran hoaks tidak akan surut hanya dengan himbauan atau pengetahuan teknis semata, selama pemicu utamanya, yaitu kerentanan emosional masyarakat tetap dibiarkan terbuka tanpa penanganan yang tepat.

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

KESIMPULAN

Kajian menunjukkan bahwa peredaran hoaks seringkali melibatkan unsur psikologis dan emosi yang mampu mempengaruhi keputusan masyarakat secara instan. Sementara itu, program literasi digital bela negara yang diterapkan pemerintah cenderung bersifat normatif dan mengikuti jalur administrasi formal. Perbedaan karakter inilah yang memunculkan kesenjangan dan menghasilkan efektivitas semu, di mana program tampak berjalan, tetapi tidak benar-benar berhasil menumbuhkan daya tangkal masyarakat terhadap hoaks. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan literasi digital perlu diarahkan pada penguasaan teknologi, penguatan kemampuan analitis, pengelolaan emosi saat menerima informasi, dan kesadaran terhadap konten media digital. Program literasi juga perlu menyesuaikan pola komunikasi publik yang lebih interaktif dan langsung agar masyarakat dapat menerimanya dengan mudah dan mendorong implementasi yang menyeluruh pada kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R. S., dkk. (2024). Bela Negara di Era Digital: Tantangan dan Strategi Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Teknologi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8418–8428. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.10783>
- Akbar, R. S., dkk. (2024). Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 16(2), 253–261. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5867>
- Evita, N., & Mukhaer, A. A. (2022). Evaluasi Komunikasi dan Literasi Digital Warga Jakarta dalam Implementasi Society 5.0. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.541>
- George, J. (2022). Uncovering the Truth about Fake News: A Research Model Grounded in Multi-Disciplinary Literature. *Journal of Management Information Systems*, 38(4), 1067-1094. <https://doi.org/10.1080/07421222.2021.1990608>
- Hakim, L., & Azizah, A. I. (2024). Critical Thinking Campaign in the National Digital Literacy Movement on Youtube Siberkreasi. *ORASI Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 109–128. <http://dx.doi.org/10.24235/orasi.v15i1.14693.g6096>
- Harjono, H. S. (2018). Literasi Digital: Prospek dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(4), 1-7. <https://doi.org/10.22437/pena.v8i1.6706>
- Komdigi. (2025). Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024. [Komdigi.go.id](https://www.komdigi.go.id). Diakses pada 25 November 2025, dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Kurniasih, E., Damayani, N. A., & Zubair, F. (2024). The Role of Information Literacy in Mitigating the Spread of Hoaxes on Social Media. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.24252/kah.v12i1a1>
- Kusumastuty, M. I. (2019). Struktur Wacana dan Karakteristik Bahasa Berita Hoaks dalam Whatsapp Messenger. [Kemedikdasmen.go.id](https://www.kemedikdasmen.go.id). Diakses pada 25 November 2025, dari

EFEKTIVITAS SEMU LITERASI DIGITAL: KESENJANGAN PROGRAM BELA NEGARA DENGAN REALITAS GEMPURAN HOAKS

[https://repositori.kemendikdasmen.go.id/20235/82/56.%20Forensik%20Kebahas
aan_M%20Imelda%20Kusumastuty_REVISI_sunting.pdf](https://repositori.kemendikdasmen.go.id/20235/82/56.%20Forensik%20Kebahas
aan_M%20Imelda%20Kusumastuty_REVISI_sunting.pdf)

- Listuti, E. M. (2023). Penanggulangan Penyebaran Hoaks yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 8(1), 16-35. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>
- Nurhaipah, T. & Ramallah, Z. (2024). Literasi Media Dalam Menangkal Informasi Hoaks Jelang Kontestasi Politik 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(2), 100-111. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i2.6834>
- Pennycook, G. Dan Rand, D. G. (2019). Fighting Misinformation on Social Media Using Crowdsourced Judgements of News Source Quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(7), 2521-2526. <https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116>
- Putri, Y. K., & Ardoni, A. (2025). Pengaruh Penerapan Literasi Digital terhadap Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial – Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31337>
- Rahayu, S. T. W., Dadang, & Rejeki, H. P. (2023). Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Era Sosial Media. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 10(1), 151-161. <https://doi.org/10.32493/skr.v10i1.28432>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Sanggarwati, D. A., Lestari, S., & Hayati, C. (2025). Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Hoaks dan Disinformasi: Sosialisasi Literasi Media Digital di Kalangan Remaja. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.63200/jependimas.v2i2.43>
- Sulistyo, M. R. D. & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 528-531. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2540>

- Tandoc, E. C. Dkk. (2021). Developing a Perceived Social Media Literacy Scale: Evidence from Singapore. *Internasional Journal of Communication*, 15(2021), 2484-2505. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/16118>
- UIN Syarif Hidayatullah. (2021). Literasi Digital Menangkal Hoaks COVID-19 di Media Sosial. *JKMS (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 10(1). <https://doi.org/10.35967/jkms.v10i1.7452>
- Vosoughi, S., Roy, D., dan Aral, S. (2018) The Spread of True and False News Online. *MIT Initiative on the Digital Economy Research Brief*, 359(6380), 1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Yunita, E., Margiyanti, I. Y., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 40–57. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.713>
- Zulmawati. (2025). Literasi Digital dan Hoaks: Tantangan Pembelajaran Kewarganegaraan Modern. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(3). <https://doi.org/10.47709/jhb.v14i03.6430>